



Strategi pemerintah daerah dalam pemberdayaan desa wisata

Local government strategy in empowering tourism villages

Hana Ihat Nurfadlilah¹, Nia Karniawati²

Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Komputer Indonesia
Email Correspondence: hana.41719019@mahasiswa.unikom.ac.id

Abstract

A tourism village is a rural area that has a special allure and is able to bring visits to tourists where more specifically a tourist village is bound by strong cultural values and traditional characteristics. When a village has been agreed upon, proclaimed as a "Tourist Village" the village should have the potential to be attractive with the characteristics of a non-urban village. These characteristics will be represented by traditional life and the uniqueness that surrounds it. The purpose of this writing is to find out the strategy of the Regional Government in empowering tourist villages. This is a form of village tourism empowerment carried out by the local government to improve the economy and maintain village wisdom. In this study, researchers used the library study method accompanied by an elaboration analysis of government regulations or policies regarding village tourism. Villages in the world of tourism certainly have their potential, including the natural wealth of the mountains or villages with the wealth of the sea, in terms of culture to history, all of which are present in the body of Bhinneka Tunggal Ika. This research uses a descriptive type with a qualitative approach. According to Moleong, qualitative methods include document observation, or literature search. The results of the study show that in the process of development or tourism village development, the village government is the main party responsible so that the community can be involved, through a regulatory strategy that has been prepared by the village government.

Keywords: *Tourism Village, Village Tourism Empowerment, Local Government*

Pendahuluan

Desa wisata merupakan salah satu eksistensi daerah yang memiliki daya tarik yang cukup tinggi di era saat ini, tidak hanya masalah heterogenitas dan kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia melainkan setiap desa yang ada di

Indonesia memiliki karakteristik uniknya tersendiri atau ciri khasnya sendiri, maka dalam proses promosinya akan banyak warga asing yang merasa penasaran dan memutuskan untuk mengunjungi secara langsung, tentu yang menjadi pertanyaan adalah mengenai bagaimana strategi atau usaha pemerintah daerah dalam melakukan promosi wisata hingga penganan desa wisata dalam menyambut wisatawan demi kemajuan desa. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi kepustakaan disertai analisis elaborasi terhadap regulasi atau kebijakan pemerintah mengenai pariwisata desa. Desa dalam dunia pariwisata tentu memiliki potensinya meliputi kekayaan alam pegunungan ataupun desa dengan kekayaan lautnya, dalam aspek budaya hingga sejarahnya yang dimana kesemua ini hadir dalam tubuh Bhinneka Tunggal Ika.

Secara tidak langsung dalam promosi desa, maka masyarakat desa dan pemerintah juga ikut mempromosikan Indonesia sang nusantara yang indah dengan tanah airnya, poin penting pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah daerah dalam melakukan pemberdayaan desa wisata, karena tidak dapat dielakkan bahwa di Indonesia masih terlalu banyak pemerintah daerah yang tidak memperhatikan kesempatan ini, padahal jika dilihat dalam regulasi, sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dikeluarkan, Desa sebagai satuan pemerintahan terbawah yang sangat berperan penting dan bertanggung jawab atas pembangunan desa. Ketentuan yang mengatur mengenai sumber dana desa agar dapat menyelenggarakan Pembangunan Desa diatur pada Nomor 60 tahun 2014, penggunaan dana tersebut diharapkan agar pemerintah desa mampu melakukan pembangunan dan pemberdayaan di desa dalam hal ini termasuk aspek pariwisata (Suranny 2020)

Konsep Desa Wisata

Desa Wisata merupakan sebuah daerah pedesaan yang mempunyai daya pikat secara special dan mampu membawa kunjungan untuk wisatawan dimana secara lebih khusus desa wisata diikat oleh nilai budaya dan karakteristik tradisional yang cukup kuat. Kemudian menurut Peraturan Kemendikbudpar (Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, dimana desa wisata merupakan sebuah bentuk yang menyatu dari atraksi, akomodasi, sarana dan prasaran pendukung wisata yang tersajikan dalam sebuah tatanan kehidupan masyarakat local yang menyatu dengan tradisi yang sudah ada secara turun temurun. Maka unsur dalam mengembangkan desa wisata adalah pemahaman akan lingkungan, alam, budaya masyarakat, arsitektur, struktur tata ruang, social ekonomi, sejarah desa, kemampuan dan pengetahuan masyarakat lokal (Mahadewi and Sudana 2017)

Ketika suatu desa telah disepakati, dicanangkan sebagai “Desa Wisata”

mestinya di desa itu memiliki potensi daya tarik dengan karakteristik pedesaan yang non-urban. Karakteristik itu akan terwakili oleh kehidupan tradisional dan keunikan-keunikan yang melingkupinya. Penilaian mendasar untuk pengembangan suatu desa atau kawasan menjadi “Desa Wisata” hendaknya memperhatikan beberapa hal, antara lain :

- a. Melestarikan warisan budaya masyarakat lokal.
- b. Pengembangan wisata harus dapat memberi manfaat bagi masyarakat setempat.
- c. Memberi pengalaman dan kenangan yang menyenangkan, mengesankan kepada wisatawan.
- d. Pengemasan potensi desa sebagai produk wisata yang dapat laku dijual.

Pendekatan karakteristik mensyaratkan adanya tindakan identifikasi dan pengkajian berbagai hal yang melekat pada desa itu yang memiliki kekhasan yang dapat dikemukakan, seperti:

- a. Karakteristik budaya Berbagai hal yang terkait dengan kehidupan budaya, tradisi, adat, kesenian, tata cara kehidupan yang diwarisi secara turun-temurun.
- b. Karakteristik yang ada hubungannya dengan mata pencaharian masyarakat di kawasan atau desa itu Yakni kehidupan sehari-hari masyarakat setempat atas pola mata pencaharian yang dilakukannya, misal: sebagai petani, pengrajin, bekerja di kebun.
- c. Karakteristik alam. Ciri khas berkenaan dengan lingkungan alam, apakah sungai, gunung, lembah, danau yang memiliki karakteristik yang dapat disampaikan.
- d. Karakteristik bangunan fisik Daya tariknya dapat diwakili oleh kondisi fisik bangunan tradisional, seperti: tempat tinggal, fasilitas umum, tempat ibadah, atau bangunan-bangunan fisik lainnya yang tidak ada duanya di tempat atau daerah lain karena keunikannya. Mengembangkan daya tarik suatu desa tidak diikuti dengan mempertimbangkan karakteristik di atas akan sama dengan memaksakan kehendak sebuah desa menjadi Desa Wisata, disamping akses dan amenities serta peran masyarakatnya (Amalia, Jihan Oktaviani. Putri 2019)

Manfaat Desa Wisata

Manfaat pengembangan desa wisata dari aspek alam, aspek sosial budaya, aspek spiritual, dan aspek ekonomi sebagai berikut:

- a. Aspek Alam: mengurangi alih fungsi lahan, terjaganya kawasan konservasi, terjaganya sumber-sumber air, kepedulian terhadap alam

- meningkat, terjaganya kualitas lingkungan, mengurangi tingkat pencemaran, dan kesadaran masyarakat dalam membuang sampah;
- b. Aspek Sosial Budaya: menghormati tradisi dan budaya, usaha menjaga tradisi dan budaya, pengenalan tradisi dan budaya, aktivitas tradisi dan budaya meningkat, regenerasi pelaku tradisi dan budaya, pementasan tradisi dan budaya, dan kekeluargaan dan kegotong-royongan meningkat;
 - c. Aspek Spiritual: kelestarian Tempat Suci, perawatan Tempat Suci, Pelaba Pura terjaga, diperkuatnya aturan Tempat Suci, keberadaan Mitos terjaga, Upacara digelar secara rutin, dan keyakinan beragama meningkat;
 - d. Aspek Ekonomi: lapangan kerja terbuka, mata pencaharian terjaga, kewirausahaan meningkat, pendapatan masyarakat meningkat, tumbuhnya UMKM, branding produk meningkat, dan kemiskinan menurun.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan tentang strategi Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan desa wisata. Menurut Moleong, metode kualitatif meliputi observasi dokumen, atau penelusuran literatur. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini menggunakan analisis kepustakaan/kualitatif dimana data diperoleh dari beberapa jurnal, berita, internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang khas, yang mengkaji fenomena masalah manusia dan masyarakat (Harisma et al. 2018)

Pembahasan

2.1. Strategi Pembangunan dan Pengembangan Desa Wisata

Kawasan Perdesaan adalah Kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social, dan kegiatan ekonomi, dalam proses pembangunannya desa diatur oleh peraturan desa. Peraturan Desa adalah peraturan peundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati Bersama Badan Permusawaratan Desa, (<https://www.dpr.go.id>)

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal (1) poin 8 dan poin 12 mengenai Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; (8) Pembangunan Desa adalah upaya

peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa; (12) Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal (4) mengenai Tujuan Pengaturan Desa, Pengaturan Desa bertujuan untuk a) memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, b) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, c) melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat Desa, d) mendorong Prakarsa, Gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan masyarakat Desa dan Aset Desa guna kesejahteraan Bersama; e) membentuk pemerintahan Desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab, f) meningkatkan pelayanan public bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, g) meningkatkan ketahanan social budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan social sebagai bagian dari ketahan social, h) memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan, i) memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Berdasarkan penjelasan regulasi di atas maka Desa Wisata adalah salah satu representasi regulasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 4, Desa wisata diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Desa dan memberikan kemajuan terhadap Desa baik dari segi adat istiadah, budaya, tradisi dan aspek lainnya yang masih konvensional. (Nugroho 2019)

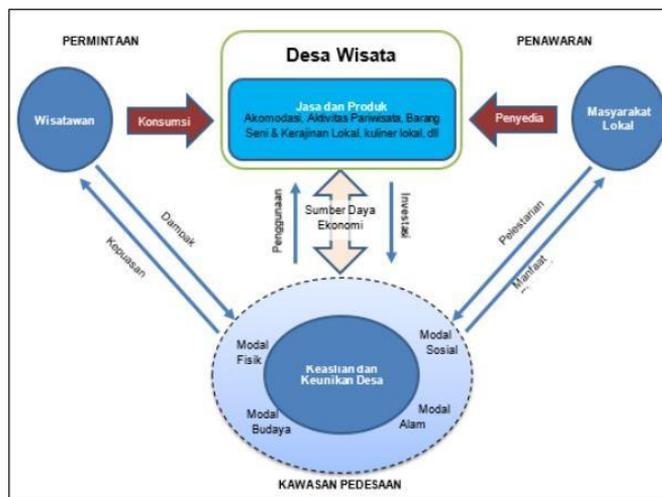
2.2. Contoh Desa Wisata

Salah satu contoh Desa Wisata yang ada di Jawa Barat yakni Desa Wisata Cilember, Bogor. Dimana Salah satu potensi yang menjadikan Desa wisata Cilember sebagai Desa wisata adalah keberadaan masyarakat pengerajin bunga kayu. Di kampung Kota Batu hamper 75% masyarakatnya adalah pengerajin. Bahan baku dalam pembuatan kerajinan tersebut adalah limbah Kayu dan hasilnya dijajakan di Taman Wisata Matahari. Tidak luput juga atraksi wisata yang ijadikan daya tarik oleh Desa Cilember adalah aktivitas ekowisata mulai dari saba lembur yaitu kegiatan yang dimana wisatawan desa diajak berkeliling kampung dan menyusuri sawah juga sungai, membajak sawah, menanam padi, beternak, berkebun, merangkai bunga kayu, pencak silat, jaipong, ngaliwet dan

masih banyak lagi. (Latianingsih et al. n.d.)

2.3. Pendekatan Perencanaan Pembangunan Kawasan Strategis Parawisata

Pendekatan perencanaan pengembangan Kawasan strategis parawisata adalah pendekatan yang bersifat dinamis terstruktur, yakni bersifat berkelanjutan, incremental, dan fleksibel, serta sistemik, komprehensif, terintegrasi, berwawasan lingkungan. (Lohia and Muna 2018). Pendekatan ini untuk mentransformasi kondisi actual Kawasan pariwisata pada kondisi yang diharapkan, dengan mempedulikan segala aspek perencanaan pengembangan. Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 2009, pembangunan pariwisata meliputi destinasi pariwisata, industry pariwisata, pemasaran pariwisata dan kelembagaan keparawisataan. Aspek-aspek pembangunan keparawisataan tersebut dijabarkan pula dalam konsep pengembangan desa wisata dalam mewujudkan keterpaduan system dalam pembangunan keparawisataan. (Damanik, Damanik, and Iskandar 2019). Proses realisasi konsep pengembangan Desa Wisata dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.1. Bagan Konseptual Pengembangan Desa Wisata

Secara umum, konsep pariwisata yang berkelanjutan diartikan sebagai proses pembangunan pariwisata yang berorientasi kepada kelestarian sumber daya yang dibutuhkan sebagai kepentingan pembangunan di masa yang akan datang, menyangkut lingkungan (ekologi), ekonomi serta kebudayaan masyarakat setempat yang merupakan unsur penting dalam proses pembangunan desa wisata. Dalam konsep desa wisata sebagai pariwisata berbasis masyarakat (community based tourism) terkandung di dalamnya sebuah konsep pemberdayaan masyarakat. (Syah 2017).

2.4. Pemberdayaan Desa Wisata

Desa Wisata apat beroperasi dengan adanya partisipasi dari seluruh pihak dalam proses pengelolaannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Para pemangku kepentingan yang memiliki peran di Desa sangat berpengaruh terhadap dampak system pengelolaan kegiatan pariwisata di Desa. Karena kebijakan yang diambil untuk pengembangan pariwisata Desa akan mempengaruhi keberhasilan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. *Stakeholders* tersebut meliputi Komunitas/masyarakat yang berperan sebagai penggerak seluruh kegiatan pariwisata, (Talib 2021). Pemerintah Desa sebagai perwakilan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat Desa dan merupakan bagian dari masyarakat sebagai system pendukung dan penggerak upaya pengembangan dan pembangunan desa wisata, Swasta berperan dalam program *Corporate Socil Responsibilities* atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Akademisi yang dimana berperang dalam penyelenggaraan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan dalam pengelolaan desa wisata serta kegiatan pemberdayaan lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa, dan terakhir Media berperan untuk memuat Berita demi kepentingan promosi Desa. (Azzaki et al. 2021)

Terdapat 3 hal dasar dalam pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata, yaitu sebagi berikut:

- a) *Penyadaran (conscientization)*, yaitu suatu proses untuk membangun pemahaman yang ditujukan untuk mempengaruhi kesadaran tentang potensi pariwisata yang dimiliki suatu desa untuk membangun desa wisata yang dikelola oleh masyarakat setempat
- b) *Pengorganisasian masyarakat (community organizing)* yaitu sebuah upaya pemberdayaan masyarakat agar memahami dan sadar terhadap kerentanan dan kapasitasnya maupun kondisi lingkungannya srta memobilisasi masyarakat dalam merespon permasalahan maupun memnuhi kebutuhannya dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, sehigga peran masyarakat dalam pengembangan desa wisata sangat utama dan penting untuk keberlangsungan pembangunan desa wisata.
- c) *Pengantara Sumber Daya Manusia (resource delivery)* yaitu memberikan pengertian dan arahan kepada masyarakat mengenai potensipariwisata dapat dikembangkan sehigga mampu menentukan kapasitas yang perlu ditingkatkan melalui pelatihan atau Pendidikan.

Pengembangan aspek industri wisata bertujuan juga untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha pariwisata yang dikelola masyarakatatau kelompok masyarakat yang berada di bawah unit pengelola desa wisata:

- 1) Mendorong dan memfasilitasi penerapan peningkatan standarisasi sertifikasi usaha pariwisata melalui penyiapan komponen-komponen pendukungnya,
- 2) Meningkatkan pengemasan produk wisata dan diversitas keragaman paket-paket produk wisata,
- 3) Membuka peluang investasi bagi investor untuk memberikan kemudahan akses dalam permodalan bagi usaha mikro dengan sumber potensi pasar secara luas sehingga dapat mendorong perluasan akses pasar. Dapat dilihat pada gambar bagan berikut ini:



Gambar 1.2. Bagan Tujuan Industri Wisata

Kesimpulan

Pengelolaan Desa Wisata dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah desa dan masyarakat desa atau seluruh pihak stakeholders dapat bekerja sama dengan baik dan aktif, ketersediaan sarana dan prasarana harus mampu memfasilitasi wisatawan, selain itu kolaborasi pihak swasta dapat membantu program desa wisata, yang sangat penting adalah pengelolaan desa wisata yang optimal dari segi kebijakan spesifik pemerintah Desa dimana didalamnya mencakup aturan yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan.

Saran

Peningkatan Sumber Daya Manusia yang dapat direalisasikan dengan pelatihan mengenai pengelolaan Desa wisata, pelatihan dapat dijalankan dengan program kerja sama dengan pihak pemerintah daerah atau dengan akademisi, pemerintah sebagai stakeholders harus memberikan ruang gerak yang sebe diberikan masyarakat di desa harus berkesinambungan dan terus menerus, masyarakat dituntun untuk lebih proaktif dalam rangka mengapresiasi diri agar keluar dari kemiskinan dan gangguan melalui kerja nyata di lingkungan desa sendiri.

Daftar Pustaka

- Amalia, Jihan Oktaviani. Putri, Tyas Aisyah. 2019. "Jurnal Pasopati." *Jurnal Pasopati* 1(2): 28–33.
- Azzaki, Roisul Agam, Nanda Arni Arisanti, Rembulan Ratnasari, and Tyah Safira. 2021. "POLICY PAPER PERATURAN DESA JARAK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA." (1311800127).
- Damanik, Dian, Dian Hotlando Damanik, and Deden Dinar Iskandar. 2019. "Strategi Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus : Desa Wisata Ponggok)." *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan* 19(2): 120–27. <https://jurnal.uns.ac.id/jiep/article/view/31944>.
- Harisma, Fitriah Bintan, Fariani Syahrul, Teguh Mubawadi, and Yudied Agung Mirasa. 2018. "Analisis Kejadian Luar Biasa Hepatitis A Di SMA X Kabupaten Lamongan Tahun 2018." *Jurnal Berkala Epidemiologi* 6(2): 112–21. <https://www.e-journal.unair.ac.id/JBE/article/view/8433/5367>.
- Latianingsih, Nining et al. "ISSN : 2775-7374 KABUPATEN BOGOR ISSN : 2775-7374." : 54–60.
- Lohia, Kecamatan, and Kabupaten Muna. 2018. "MUNA Resti^{1 1} Alumni Pendidikan Geografi FKIP UHO Kata Kunci : Strategi , Pemerintah Desa , Pengembangan , Pantai Meleura Resti STRATEGY OF VILLAGE GOVERNMENT IN DEVELOPING OBJECT OF COASTAL TOURISM MELEURA IN LAKARINTA VILLAGE DISTRICT LOHIA MUNA REGENCY." 3(4): 115–29.
- Mahadewi, Ni Putu Eka, and I Putu Sudana. 2017. "Model Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat." *Jurnal Analisis Pariwisata* 17(1): 41–45.
- Nugroho, Adi. 2009. "Buku Perancangan." : 1–140.
- Suranny, Lilyk Eka. 2020. "Pengembangan Potensi Desa Wisata Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Perdesaan Di Kabupaten Wonogiri." *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan* 5(1): 49–62.
- Syah, Firman. 2017. "Strategi Mengembangkan Desa Wisata." *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank Ke-3 3*(Sendi_U 3): 335–41.
- Talib, Desrika. 2021. 3 Tulisan Ilmiah Pariwisata (TULIP) *Analisis Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Destinasi Wisata*.
- Wisata, Perancangan Desa. 2021. *Leran Kulon*.